

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui apa saja indikasi *fraud* Pengadaan Barang/Jasa dan bagaimana strategi Auditor Internal Pemerintah dalam mendeteksi *fraud* Pengadaan Barang/Jasa. Data diperoleh dengan melakukan wawancara langsung kepada Auditor Internal Pemerintah Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Bidang Investigasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa :

1. Indikasi-indikasi *fraud* dalam Pengadaan Barang/Jasa disusun berdasarkan tahapan atau proses pengadaan, diantaranya Indikasi pada tahap perencanaan diantaranya perencanaan tidak sesuai kebutuhan, perencanaan hanya disesuaikan dengan keinginan pihak tertentu, terjadinya penggelembungan harga (*Mark-up*) dalam proses penyusunan anggaran, terdapat penyedia mahkota, dan spesifikasi barang tidak sesuai kebutuhan. Pada Tahapan Persiapan Pengadaan terdapat indikasi seperti terjadinya konflik kepentingan dalam artian terjadi penunjukan oleh orang yang memiliki hubungan khusus dengan calon penyedia, spesifikasi barang/jasa hanya dapat dilakukan oleh penyedia tertentu, terjadi *Mark-up* HPS dan tidak disusun berdasarkan keahlian atau tidak membandingkan harga pasar. Pada tahap Persiapan Pemilihan Penyedia terdapat indikasi pada penetapan sistem pemilihan penyedia dan Penyusunan dokumen tidak sesuai dengan ketentuan. Pada tahap Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa kerap terjadi Perubahan secara substansi pada dokumen pemilihan atau *Post Bidding*, Pembatasan akses calon penyedia pada saat pemasukan dokumen penawaran, dan Proses sanggah serta sanggah banding dan jawaban tertulis atas sanggah banding tidak dilaksanakan secara adil, transparan dan akuntabel serta dalam proses pemilihan biasanya Pokja atau kelompok kerja tidak melakukan Evaluasi, Pokja tidak paham cara melakukan Evaluasi, Pokja tidak melakukan pembuktian Kualifikasi, dan juga Pokja membiarkan terjadinya persaingan

tidak sehat. Pada tahap pelaksanaan kontrak Pengadaan Barang/Jasa, Auditor membagi indikasi menjadi 2 kelompok yaitu Indikasi pada proses penandatanganan kontrak diantaranya draft kontrak tidak diperiksa serta draft di tandatangi oleh penyedia yang tidak berhak dan Indikasi pada proses pelaksanaan kontrak diantaranya uang muka tidak di *back up* dengan jaminan uang muka, Kondisi lapangan tidak sesuai dengan kontrak, Pelaksanaan kontrak tidak sesuai ketentuan, dan Addendum waktu dilaksanakan tidak sesuai dengan fakta lapangan. Pada tahap proses serah terima terjadi indikasi-indikasi berupa pemeriksaan fisik hanya formalitas oleh PPK, hasil pengadaan Barang/Jasa yang diserahkan tidak sesuai kontrak, dan pengambilan retensi atau jaminan pemeliharaan dilakukan sebelum proses serah terima tuntas (FHO).

2. Strategi yang dilakukan Auditor Internal Pemerintah dalam melakukan Pendeteksian *fraud* Pengadaan Barang/Jasa yaitu dengan melakukan Audit Pengadaan Barang/Jasa berbasis risiko. Audit Berbasis Risiko (*Risk Based Audit*) merupakan suatu teknik audit dimana semua kegiatan audit dimulai dari perencanaan audit, pelaksanaan audit, dan pelaporan hasil audit yang berbasis pada prioritas risiko, Audit Berbasis Risiko dijalankan oleh auditor internal pemerintah dalam pelaksanaan penugasan auditnya melalui pemahaman dan pendekatan atas risiko yang harus diantisipasi, dihadapi, atau dialihkan untuk mencapai tujuan. Dalam mendeteksi *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa, Auditor Internal Pemerintah menyusun *Risk Mapping* terhadap Pengadaan Barang/Jasa mulai dari proses perencanaan, pemilihan, pelaksanaan, dan serah terima Barang/Jasa. *Risk Mapping* akan diperdalam pada Indikasi-Indikasi kritis terjadinya penyimpangan.

## 5.2 Saran

Dalam sebuah penelitian, seorang penulis hendaknya memberikan saran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, lembaga atau instansi, serta pihak yang terkait di dalam penelitian. Saran yang diberikan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Auditor Internal Pemerintah disarankan untuk lebih memperdalam indikasi-indikasi *fraud* Pengadaan Barang/Jasa serta disarankan untuk meningkatkan strategi Pendeteksian *fraud* Pengadaan Barang/Jasa seperti pemanfaatan *Artificial Intelligence (AI)* dan pembuatan aplikasi pendeteksian *fraud* yang disebabkan oleh kejahatan digital mengingat semakin majunya teknologi dan modus kecurangan serta masih banyaknya kasus *fraud* Pengadaan Barang/Jasa saat ini.
2. Penelitian ini hanya membahas Indikasi dan Strategi Pendeteksian *fraud* Pengadaan Barang/Jasa sehingga bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas lagi objek penelitian seperti *fraud* laporan keuangan dan *fraud* penyalahgunaan aset sehingga tidak hanya sebatas *fraud* Pengadaan Barang/Jasa saja.